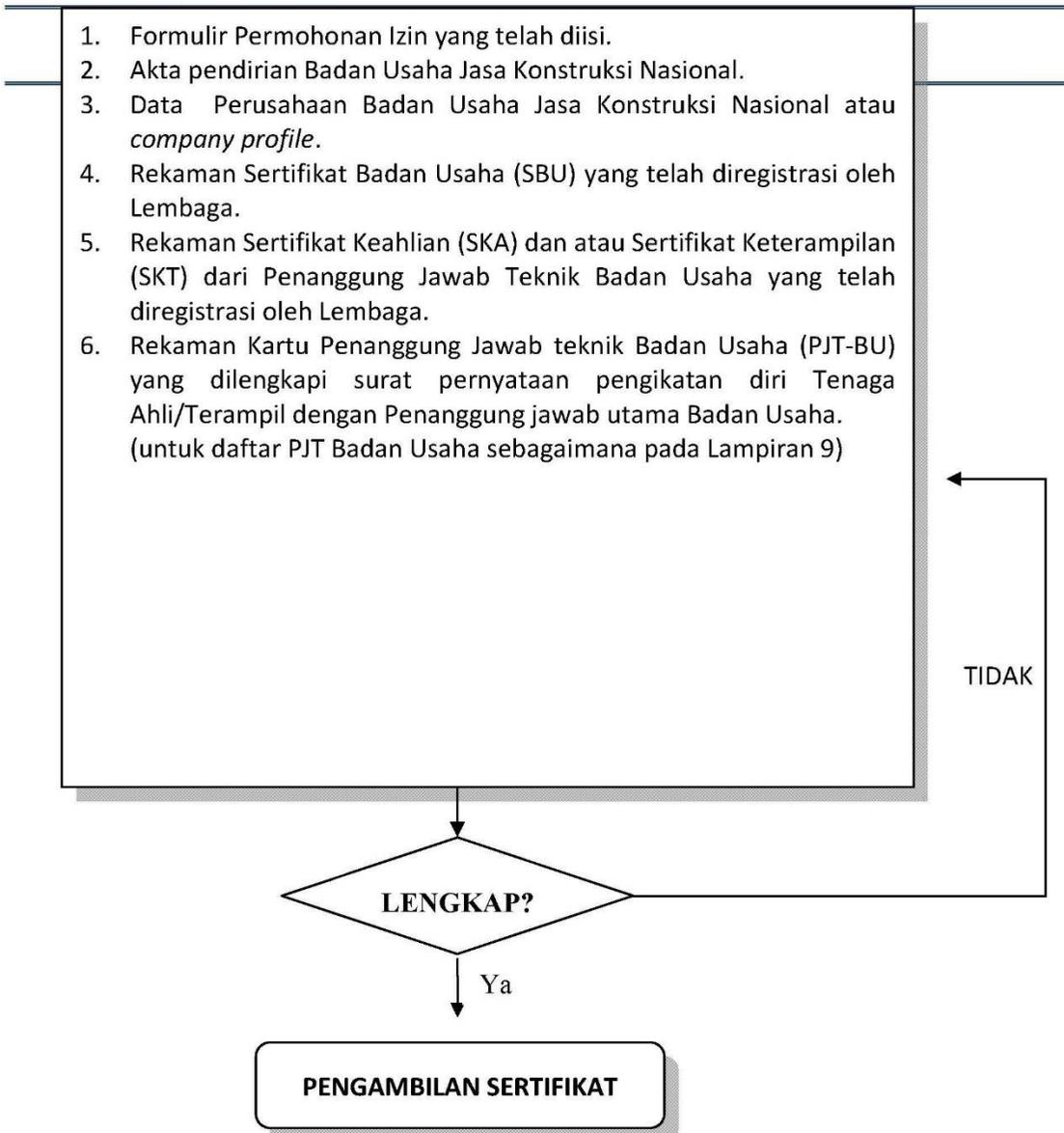


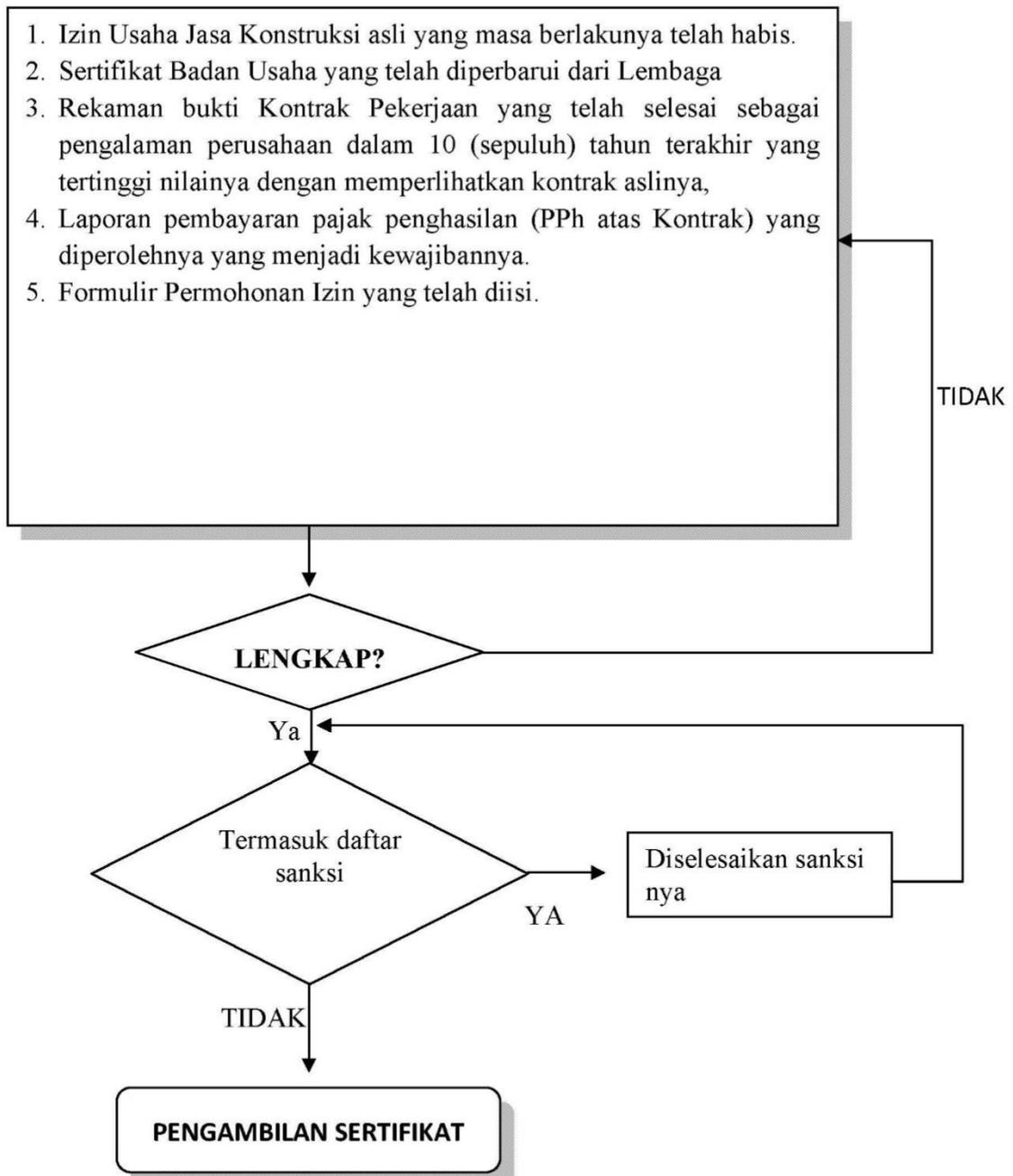
Lampiran VIa
Peraturan Daerah Kota Ternate
Nomor : 2 Tahun 2016
Tanggal : 7 Maret 2016

ALUR PROSES PERIZINAN DAN DOKUMEN PERSYARATAN UNTUK IZIN BARU



Lampiran VIb
Peraturan Daerah Kota Ternate
Nomor :2 Tahun 2016
Tanggal : 7 Maret 2016

ALUR PROSES PERIZINAN DAN DOKUMEN PERSYARATAN UNTUK PERPANJANGAN IZIN



Lampiran VIc
Peraturan Daerah Kota Ternate
Nomor : 2 Tahun 2016
Tanggal :7 Maret 2016

ALUR PROSES PERIZINAN DAN DOKUMEN PERSYARATAN UNTUK PERUBAHAN DATA

1. Untuk mengganti alamat
 - a. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang asli;
 - b. Surat Keterangan Domisili Badan Usaha Jasa Konstruksi yang dikeluarkan oleh Kelurahan setempat;
 - c. Formulir Permohonan Izin yang telah diisi.
2. Untuk mengganti data direksi/pengurus badan usaha
 - a. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang asli;
 - b. Surat penunjukan dari badan usaha kepada direksi/pengurus baru.
 - c. *Curriculum Vitae* dari Pimpinan BUJK baru;
 - d. Formulir Permohonan Izin yang telah diisi;
3. Untuk mengganti nama perusahaan
 - a. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang asli;
 - b. Akta Penggantian Nama Perusahaan;
 - c. Surat Keterangan Domisili Usaha Jasa Konstruksi yang dikeluarkan oleh Kelurahan setempat;
 - d. Formulir Permohonan Izin yang telah diisi;
4. Untuk mengganti data nilai kontrak pekerjaan
 - a. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang asli;
 - b. Kontrak pekerjaan yang diselesaikan/dilaksanakan.
 - c. Formulir Permohonan Izin yang telah diisi;
5. Untuk mengganti klasifikasi/kualifikasi
 - a. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang asli;
 - b. Sertifikat Badan Usaha yang telah diperbarui dari Lembaga;
 - c. Formulir Permohonan Izin yang telah diisi;



PENGAMBILAN SERTIFIKAT

Lampiran VIId
Peraturan Daerah Kota Ternate
Nomor : 2 Tahun 2016
Tanggal : 7 Maret 2016

ALUR PROSES PERIZINAN DAN DOKUMEN PERSYARATAN UNTUK PENUTUPAN IZIN

1. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang asli.
2. Surat pajak nihil, yang dapat diperoleh dari Kantor Pajak setempat.
3. Formulir Permohonan Izin yang telah diisi.



**PENGAMBILAN SURAT KETERANGAN
PENUTUPAN IUJK**

Lampiran Ila
 Peraturan Daerah Kota Ternate
 Nomor : 2 Tahun 2016
 Tanggal :7 Maret 2016

FORMULIR PERMOHONAN IUJK NASIONAL JASA PELAKSANA KONSTRUKSI				
Nomor :	, 20...		
Lampiran :				
Kepada Yth. Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di				
Perihal :		Permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Nasional		
Dengan hormat,				
Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk memperoleh Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yakni Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi untuk:				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan Izin Baru 2. Memperpanjang Izin Usaha 3. Mengubah data 4. Penutupan Izin 				
Di Kabupaten/Kota Provinsi untuk klasifikasi pekerjaan sebagai berikut:				
No	Klasifikasi/Sub Klasifikasi Usaha Yang diinginkan	Nama Paket Pekerjaan yang pernah dilaksanakan (Bila belum punya - tulis belum punya, manfaatkan nilai paket tertinggi) – 10 tahun lalu	Tahun Pelaksanaan	Nilai Paket Pekerjaan
	Lihat Klasifikasi/Sub Klasifikasi Usaha pada Tabel			
		Sesuaikan Klasifikasi/Sub Klasifikasi pekerjaan pada SBU dengan Klasifikasi/Sub Klasifikasi usaha		
Bersama ini kami lampirkan persyaratan-persyaratan dan keterangan sebagai berikut :				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekaman Sertifikat Badan Usaha 2. Rekaman Akta Pendirian dan perubahan terakhir 3. Rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha 4. Rekaman Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha 5. Surat Pernyataan Pengikatan Diri SPPJT dan Penanggung Jawab BUJK 6. dst. 				
Demikian permohonan kami dan atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.				
			Pemohon	
			PT/CV.	
			Penanggung Jawab Badan Usaha	
			Nama Jelas	
(*) coret yang tidak sesuai				
Catatan :				

Lampiran Iib
 Peraturan Daerah Koa Ternate
 Nomor : 2 Tahun 2016
 Tanggal : 7 Maret 2016

**FORM PERMOHONAN IUJK NASIONAL
 JASA PERENCANA/PENGAWAS KONSTRUKSI**

Nomor : 20...
 Lampiran :

Kepada Yth.
 Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

 Di

Perihal : Permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Nasional

Dengan hormat,

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk memperoleh Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yakni Usaha Jasa Perencana/Pengawas (*) Konstruksi untuk:

1. Permohonan Izin Baru
2. Memperpanjang Izin Usaha
3. Mengubah data
4. Penutupan Izin

Di Kabupaten/Kota Provinsi untuk klasifikasi pekerjaan sebagai berikut:

No	Klasifikasi/Sub Klasifikasi Usaha Yang diinginkan	Nama Paket Pekerjaan yang pernah dilaksanakan (Bila belum punya - tulis belum punya, manfaatkan nilai paket tertinggi)	Tahun Pelaksanaan	Nilai Paket Pekerjaan
	Lihat Klasifikasi/Sub Klasifikasi Usaha pada SBU			
		Sesuaikan Klasifikasi/Sub Klasifikasi pekerjaan pada SBU dengan Klasifikasi/Sub Klasifikasi usaha		

Bersama ini kami lampirkan persyaratan-persyaratan dan keterangan sebagai berikut :

1. Rekaman Sertifikat Badan Usaha
2. Rekaman akta pendirian dan perubahan terakhir.
3. Rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha
4. Rekaman Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha.
5. Surat Pernyataan Pengikatan Diri SPPJT dan Penanggung Jawab BUJK
6. dst.

Demikian permohonan kami dan atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon
 PT.
 Penanggung Jawab Badan Usaha
 Nama Jelas

(*) coret yang tidak sesuai

Catatan :

Lampiran IX
Peraturan Daerah Kota Ternate
Nomor :2 Tahun 2016
Tanggal : 7 Maret 2016

FORMAT KARTU TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN

	PEMERINTAH KOTA TERNATE KOP INSTANSI PEMBERI IUJK
KARTU TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN NOMOR :	
Nama :	
Tempat / Tgl. Lahir :	
Alamat :	
No SKA/SKT :	
Klasifikasi/Sub Klasifikasi :	
Tanda tangan Pemegang kartu	
	FOTO
, 20..... PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA.....
	TTD NAMA NIP

Lampiran V
Peraturan Daerah Kota Ternate
Nomor : 2 Tahun 2016
Tanggal : 7 Maret 2016

PEMBERIAN NOMOR PADA IUJK NASIONAL

Pemberian Nomor Kode kepada Badan Usaha sbb:

Jumlah digit :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

Digit 1 : Bentuk usaha diisi 1 = Perusahaan nasional

Digit 2 s/d 5 : Untuk kode kabupaten/kota dimana perusahaan berdomisili sesuai dengan Kode yang dikeluarkan BPS.

Digit 6 : Jenis usaha diisi
 1 = Jasa Perencanaan
 2 = Jasa Pelaksanaan
 3 = Jasa Pengawasan
 4 = Gabungan dari ketiganya

Digit 7 s/d 11 : Untuk nomor urut yang tercatat di Kabupaten/Kota (masing-masing jenis Usaha perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dimulai dengan nomor 00001).

Digit 12 s/d 17 : No urut ini tetap dipakai walaupun telah diperpanjang/diubah/kadaluarsa : Nomor Registrasi pada LPJK Daerah

Contoh 1.

Sebuah badan usaha jasa konstruksi berdomisili di Surakarta dan terdaftar di LPJK Provinsi Jawa Tengah dengan nomor 809465 serta tercatat pada buku induk Pemerintah Daerah Surakarta No. 00811 berusaha di bidang pelaksanaan maka kode badan usaha tersebut adalah

- 1. Badan Usaha : 1 (Badan Usaha Nasional)
- 2. Kode kota Surakarta : 3372
- 3. Jenis Usaha : 2 (Jasa pelaksana)
- 4. Nomor Urut Badan Usaha : 00811
- 5. Tercatat di LPJK : 809465
- Kode Badan Usaha :

1 – 3372 – 2- 00811- 809465

Lampiran Ia
Peraturan Daerah Kota Ternate
Nomor : 2 Tahun 2016
Tanggal : 7 Maret 2016

FORM HALAMAN DEPAN IUJK NASIONAL

LOGO PEMERINTAH DAERAH

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI NASIONAL

Nomor :

Nama Badan Usaha :
Alamat Kantor Badan Usaha :
 Jalan, Nomor :
 Kelurahan :
 RT/RK/RW :
 Kabupaten/Kota : Kode Pos : (wajib diisi)
 Provinsi :
 Nomor Telepon : No. Fax :

Nama Penanggungjawab Utama Badan Usaha / Direktur Utama/Direktur *)

Nama 1 :
Nama 2 :
Nama 3 :

N.P.W.P Badan Usaha :

Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) ini berlaku untuk melakukan Kegiatan Usaha Jasa
..... **) Konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Kualifikasi : Kecil/Menengah/Besar (***)
Nama Penanggung jawab-Teknis :
No PJT-BU :
Klasifikasi : (tertera di lembar belakang IUJK Nasional)

Berlaku sampai dengan tgl. :

Dikeluarkan di :
Pada tanggal :

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Cap dan tandatangan

(.....)
NIP

Catatan :

- *) dilihat pada akte pendirian perubahan terakhir, adalah yang berhak menandatangani kontrak
- **) diisi sesuai dengan kegiatan usaha : Perencanaan /Pelaksanaan/Pengawasan
- ***) coret yang tidak perlu

Lampiran Ib
 Peraturan Daerah Kota Ternate
 Nomor : 2 Tahun 2016
 Tanggal : 7 Maret 2016

FORM HALAMAN BELAKANG IUJK NASIONAL

Nama Badan Usaha :
 Nomor IUJK :
 Jenis Usaha : Pelaksana

No	Klasifikasi Usaha	Sub Klasifikasi Pekerjaan	Nama Paket Pekerjaan Tertinggi	Tahun Pelaksanaan Proyek	Nilai Pekerjaan (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
	Klasifikasi usaha	Sub klasifikasi pekerjaan (tuliskan sesuai dan harus sama dengan yang tertera dalam SBU)				BUJK yang punya sub klasifikasi pekerjaan pada kolom 3, tapi tidak punya kontrak atau badan usaha yang baru berdiri maka pada Kolom Paket Pekerjaan Tertinggi ditulis nol. BUJK boleh mengikuti pelelangan sesuai dengan Klasifikasi/Sub Klasifikasi pekerjaan pada kolom 3.

Lampiran Ic
Peraturan Daerah Kota Ternate
Nomor : 2 Tahun 2016
Tanggal : 7 Maret 2016

FORM HALAMAN DEPAN IUJK NASIONAL

LOGO PEMERINTAH DAERAH

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI NASIONAL

Nomor :

Nama Badan Usaha :

Alamat Kantor Badan Usaha :

Jalan, Nomor :

Kelurahan :

RT/RK/RW :

Kabupaten/Kota :

Kode Pos : (wajib diisi)

Provinsi :

Nomor Telepon :

No. Fax :

Nama Penanggung Jawab Utama Badan Usaha / Direktur Utama/Direktur *)

Nama 1 :

Nama 2 :

Nama 3 :

N.P.W.P Badan Usaha :

Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) ini berlaku untuk melakukan Kegiatan Usaha Jasa

**) Konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Kualifikasi : Kecil/Menengah/Besar (***)

Nama Penanggung jawab-Teknis :

No PJT-BU :

Klasifikasi : (tertera di lembar belakang IUJK Nasional)

Berlaku sampai dengan tgl. :

Dikeluarkan di :

Pada tanggal :

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Cap dan tandatangan

(.....)
NIP

Lampiran Id
 Peraturan Daerah Nomor : 2 Tahun 2016
 Tanggal : 7 Maret 2016

FORM HALAMAN BELAKANG IUJK NASIONAL

Nama Badan Usaha :
 Nomor IUJK :
 Usaha : Perencana/Pengawas

No	Klasifikasi Usaha	Sub Klasifikasi Pekerjaan	Nama Paket Pekerjaan Tertinggi	Tahun Pelaksanaan Proyek	Nilai Pekerjaan (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
	Klasifikasi usaha (Pilih yang sesuai) yakni a.Arsitektur b.Rekayasa (Engineering) c.Penataan Ruang d.Jasa Konsultansi lainnya	Sub klasifikasi pekerjaan (tulis sesuai dan harus sama dengan yang tertera dalam SBU)				BUJK yang punya sub klasifikasi pekerjaan pada kolom 3, tapi tidak punya kontrak atau badan usaha yang baru berdiri maka kolom Nama Paket Pekerjaan tertinggi tetap ditulis nol. BUJK boleh mengikuti pelelangan sesuai dengan bidang/sub bidang pekerjaan pada kolom 3.

Lampiran VIII
 Peraturan Daerah Kota Ternate
 Nomor : 2 Tahun 2016
 Tanggal : 7 Maret 2016

**FORM LAPORAN INSTANSI PENERBIT IUJK NASIONAL YANG
 DITUNJUK KEPADA BUPATI/WALIKOTA**

LAPORAN PENERBITAN /SANKSI IUJK NASIONAL

KABUPATEN / KOTA
 TAHUN :
 SEMESTER KE :

Provinsi :
 Jenis Usaha : Jasa Perencanaan/Jasa Pelaksana/Jasa Pengawasan :

No	Tahun/ periode bulan	Jumlah dokumen Permohonan (total) selama 6 bulan	Jumlah IUJK (buah)				Keterangan
			Permohonan	Perubahan	Perpanjangan	Dikenakan Sanksi	
			Badan usaha baru	Badan usaha	Badan USaha	Badan usaha	
1	2	3	4	5	6	7	8
						1. Peringatan 1 Peringatan 2 2. Peringatan 3 atau Pembekuan 3. Pencairan Sanksi 4. Pencabutan Sanksi	Jumlah Keseluruhan s.d tgl ini BUJK yang diberikan IUJK 1. Usaha Jasa Perencana = 2. Usaha jasa Pelaksana = 3. Usaha Jasa Pengawasan =

Tembusan :

1. Gubernur
2. Gubernur melakukan Rekapitulasi setiap 6 bulan sekali dan dilaporkan ke Menteri yang bertanggungjawab dalam bidang konstruksi

....., tgl.
 Pemerintah Kabupaten/Kota

Catatan :

- Dibuat sesuai kegiatan
- Setiap akhir bulan Juni dan Desember, pemberi IUJK melaporkan kepada Bupati/Walikota dan tembusan ke gubernur

Lampiran III
Peraturan Daerah Kota Ternate
Nomor : 2 Tahun 2016
Tanggal : 7 Maret 2016

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth.
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Di -

Perihal : Keterangan Penutupan Badan Usaha Jasa Konstruksi

Menunjuk Surat Penutupan Nomor tanggal perihal *Penutupan Badan Usaha* dengan ini kami beritahukan bahwa Badan Usaha Jasa Konstruksi tersebut yang terdaftar di Pemerintah Kabupaten/Kota dengan sertifikat No. tanggal dengan masa berlaku sampai dengantelah menghentikan kegiatan usahanya.

Data perusahaan jasa konstruksi yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Nama Perusahaan :

Alamat :

Jenis Usaha :

Penanggung Jawab :

Utama Badan Usaha :

Demikian agar menjadi maklum dan atas perhatian serta kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Instansi Penerbit IUJK

Ttd

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Dir. Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, Ditjen Pembinaan tenaga Kerja, Depnaker
2. (Nama Badan Usaha)

Lampiran IV
Peraturan Daerah Kota Ternate
Nomor : 2 Tahun 2016
Tanggal : 7 Maret 2016

KOP SURAT UNIT KERJA/INSTANSI

Nomor :
Lampiran : -

Kepada Yth.
(Instansi Pemberi IUJK)
Di – Tempat

Perihal : Rekomendasi Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi

Menunjuk Surat Nomor..... Tanggal, Perihal seperti (surat dari pemohon IUJK), bersama ini dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
2. Memperhatikan Peraturan Daerah Nomor : tanggal tentang
3. Serta setelah meneliti berkas permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi dari :

Nama Perusahaan :
Nama PJBU :
Alamat Perusahaan :
Jenis Usaha :

Maka dengan ini (Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi atau Pejabat yang ditunjuk oleh Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi) memberikan rekomendasi kepada Badan Usaha Jasa Konstruksi tersebut untuk memperoleh Izin Usaha Jasa Konstruksi dengan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Badan Usaha Nomor

Demikian agar menjadi maklum dan atas perhatian serta kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

(Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi atau Pejabat yang
ditunjuk oleh *Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi*)
ttd

Lampiran X
Peraturan Daerah Kota Ternate
Nomor : 2 Tahun 2016
Tanggal : 7 Maret 2016

KOP INSTANSI PENERBIT IUJK

FORMULIR PERMOHONAN

PENDAFTARAN USAHA ORANG PERSEORANGAN

NAMA :

KABUPATEN/KOTA :

PROVINSI :

TEMPAT/TANGGAL LAHIR :

ALAMAT :

NO. SKS/SKT :

PILIHAN KUALIFIKASI/SUB KUALIFIKASI

NO	KODE	URAIAN
1		
2		

PILIHAN KLASIFIKASI/SUB KLASIFIKASI

NO	KODE	URAIAN
1		
2		

Lampiran XI
Peraturan Daerah Kota Ternate
Nomor 2 Tahun 2016
Tanggal : 7 Maret 2016



PEMERINTAH KOTA TERNATE

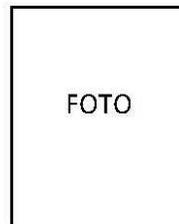
KOP INSTANSI

KARTU PENANGGUNG JAWAB TEKNIK BADAN USAHA

NOMOR :

Nama :
Tempat / Tgl. Lahir :
Alamat :
No SKA/SKT :
Klasifikasi/Sub Klasifikasi :

Tanda tangan
Pemegang kartu



....., 20.....
INSTANSI.....

TTD
NAMA
NIP

Lampiran IX
Peraturan Daerah Kota Ternate
Nomor 2 Tahun 2016
Tanggal : 7 Maret 2016

FORMAT KARTU TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN

	PEMERINTAH KOTA TERNATE KOP INSTANSI PEMBERI IUJK
KARTU TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN NOMOR :	
Nama :	
Tempat / Tgl. Lahir :	
Alamat :	
No SKA/SKT :	
Klasifikasi/Sub Klasifikasi :	
Tanda tangan Pemegang kartu	<div data-bbox="889 1166 1064 1382" style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 130px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">FOTO</div>
, 20..... PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA.....
	TTD NAMA NIP